MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Dinamika Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar serta Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis

Wika Maylani[1], Mila Uraini[2], Nia Lestari[3], Dwi Saputra[4], M.Fuad Harits[5]
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
wikath2024@gmail.com,milauraini23@gmail.com,nialestari56789@gmail.com,
dwi12saputra12@gmail.com, fuadharitsmuhammad@gmail.com,

ABSTRACT

This research discusses the development of Rupat Island as one of the outermost islands in Riau Province, which borders Malaysia. Rupat Island has great potential in tourism and agribusiness, but it still faces several problems, such as limited infrastructure, poverty, lack of public facilities, and weak border supervision. In addition, the Akit ethnic community still experiences disadvantages in economic, educational, and social aspects.This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation involving local communities, traditional leaders, and government officials in North Rupat District.The results show that the government has planned various development projects, such as making Rupat Island a leading tourist destination, building connecting roads, a Roro port, a State Border Post (PLBN), and organizing various events to attract tourists. However, the implementation has been slow due to a lack of cooperation in programs and budgets between the central, provincial, and district governments.Besides infrastructure development, community empowerment is also an important concern. Various programs related to economic assistance, healthcare, education, and public awareness have been carried out by the government and NGOs. However, these programs have not given special attention to the Akit community, which still needs greater support.In conclusion, the development of Rupat Island and the empowerment of the Akit community need to be improved through better cooperation between the central, provincial, and district governments, as well as local communities. Therefore, development can be more evenly distributed and the welfare of the people of Rupat Island can improve.

Keyword: Rupat Island, Development, Akit Community, Community Empowerment, Tourism, Infrastructure, Government Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pembangunan Pulau Rupat sebagai salah satu pulau terluar di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pulau Rupat memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata dan agrobisnis, tetapi masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan infrastruktur, kemiskinan, kurangnya fasilitas umum, serta

lemahnya pengawasan wilayah perbatasan. Selain itu, masyarakat Suku Akit masih mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh adat, serta aparat pemerintah di Kecamatan Rupat Utara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah merencanakan berbagai pembangunan, seperti menjadikan Pulau Rupat sebagai kawasan wisata unggulan, membangun jalan penghubung, pelabuhan Roro, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta mengadakan berbagai kegiatan untuk menarik wisatawan. Namun, pelaksanaannya masih berjalan lambat karena kurangnya kerja sama program dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.Selain pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Berbagai program bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan telah dilakukan oleh pemerintah maupun LSM. Namun, program tersebut belum memberikan perhatian khusus kepada Suku Akit yang masih membutuhkan dukungan lebih besar.
Kesimpulannya, pembangunan Pulau Rupat dan pemberdayaan masyarakat Suku Akit perlu ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat Pulau Rupat dapat meningkat.

Kata kunci: Pulau Rupat, Pembangunan, Suku Akit, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata, Infrastruktur, Kebijakan Pemerintah.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.480 pulau dengan dominasi wilayah perairan mencapai sekitar 75 persen dari total luas teritorialnya. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang memiliki gugusan pulau terluar di garis perbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, isu akselerasi pembangunan kawasan perbatasan menjadi agenda krusial. Hal ini dipicu oleh maraknya praktik eksploitasi sumber daya alam secara ilegal oleh pihak asing, seperti penebangan liar (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing), yang berdampak buruk pada kelestarian ekosistem. Selain itu, kedekatan rumpun budaya serta adat istiadat antara warga Melayu Riau dan masyarakat Malaysia, yang berkelindan dengan ketimpangan ekonomi, mendorong tingginya arus migrasi warga lokal untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga

Kerja Indonesia (TKI), baik melalui jalur resmi maupun nonprosedural. Minimnya pengawasan di titik perbatasan turut membuka celah kerawanan terhadap tindak pidana lintas negara (transnational crime), seperti peredaran narkotika dan tindak pidana perdagangan orang.

Transformasi sosial di tengah masyarakat pada hakikatnya berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah, semisal ekspansi kawasan perkotaan yang diiringi pembangunan fisik dan penyediaan infrastruktur penunjang kesejahteraan rakyat. Perubahan tersebut memacu percepatan mobilitas warga sehingga penduduk di wilayah perdesaan sekalipun kini mampu mengakses arus informasi melalui beragam kanal media cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, majalah, dan siaran televisi. Meski begitu, realitas tersebut tidak serta-merta menghapus keberadaan kelompok masyarakat yang menetap di wilayah terpencil dan terisolasi secara geografis maupun kultural.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi kondisi keterisolasian tersebut. Pertama, adanya kecenderungan dari komunitas desa terpencil itu sendiri untuk membatasi diri dari pengaruh luar demi menjaga jarak kultural, sebagaimana yang terlihat pada komunitas Suku Akit yang bermukim secara tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Riau, meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Siak. Kedua, faktor hambatan geografis yang menyulitkan konektivitas menuju desa lain atau pusat kota terdekat sehingga warga terhambat dalam menjangkau fasilitas publik. Ketiga, meskipun suatu wilayah secara fisik relatif mudah diakses, masyarakatnya memilih menutup diri dari interaksi luar demi mempertahankan kemurnian adat istiadat leluhur. Ketiga karakteristik inilah yang secara umum merepresentasikan definisi suku terasing atau Komunitas Adat Terpencil (KAT).

B. METODE

Untuk menggali fenomena tersebut, pendekatan kualitatif dipilih guna menghasilkan sajian data deskriptif berupa narasi lisan maupun tulisan dari subjek dan perilaku yang diamati, merujuk pada pandangan Bogdan dan Taylor. Pendekatan ini dipadukan dengan metode studi kasus sebagai suatu penyelidikan empiris yang menelaah realitas kehidupan nyata secara utuh. Sasaran kajian mencakup penduduk Kecamatan Rupat Utara secara umum dan komunitas asli Suku Akit secara khusus, yang tersebar di Desa Titi Akar, Tanjung Medang, Tanjung Punak, Kadur, Teluk Rhu, Putri Sembilan, Suka Damai, hingga Desa Hutan Ayu. Fokus utama diarahkan pada analisis mendalam terhadap kebijakan pembangunan Pulau Rupat dan skema pemberdayaan Suku Akit. Sumber data dihimpun dari unsur aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuka agama, serta pemimpin adat atau batin Suku Akit yang menguasai seluk-beluk permasalahan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive dan metode bola salju (snowball), yang terbagi ke dalam kategori informan pangkal serta informan kunci (key informan).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang menentukan kelancaran penjaringan informasi di lapangan. Mengacu pada konsep Lexy J. Moleong, manusia sebagai instrumen penelitian memiliki karakteristik responsif, adaptif, berorientasi pada keutuhan konteks, bertumpu pada bekal pengetahuan, mampu mengolah informasi secara cepat, serta sigap memanfaatkan momentum. Data yang terhimpun diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder, yang dijaring melalui kombinasi teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif (participant observation), serta studi dokumentasi.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa kepemimpinan Bupati Herliyan Saleh, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memproyeksikan Pulau Rupat sebagai sentra pengembangan pariwisata dan agrobisnis. Arah kebijakan ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2008, di mana Pulau Rupat ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Rancangan pembangunan wilayah ini sebagai kawasan wisata dan agrobisnis layak diapresiasi, namun dampaknya belum dapat dirasakan secara optimal oleh warga lantaran lambatnya eksekusi program. Memasuki tahun keempat pelaksanaan, Pulau Rupat belum sepenuhnya siap beroperasi sebagai destinasi wisata akibat minimnya dukungan sarana prasarana, yang diperparah oleh belum terwujudnya skema berbagi anggaran (sharing budget) maupun sinergi program (sharing program) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Padahal, pemerintah di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten telah merumuskan komitmen bersama untuk memajukan Pulau Rupat sebagai wilayah terluar, baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Daerah (RPJPD), maupun penjabarannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD). Di tingkat pusat, RPJPN memplot Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pengembangan multisektor, termasuk menjadikannya destinasi wisata berskala nasional. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat meninjau Pulau Rupat pada 15 Januari 2011 bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, serta Gubernur Riau HM Rusli Zainal, yang menyatakan bahwa

penetapan Pulau Rupat sebagai kawasan wisata nasional telah memasuki tahap pembahasan serius di tingkat pemerintah pusat.

Menindaklanjuti mandat RPJMD Provinsi Riau melalui Perda Nomor 15 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggulirkan proyek pembangunan jalan poros yang menghubungkan Batu Panjang di Kecamatan Rupat menuju Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara. Meski pengerjaan jalan tersebut telah memasuki tahun keempat dan terus dipacu, pantauan langsung di lapangan memperlihatkan bahwa ruas jalan di beberapa desa masih sebatas tahap pengerasan menggunakan material pasir dan batu. Selain infrastruktur jalan, pemerintah kabupaten turut membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Tanjung Medang sebagai pusat layanan administrasi keimigrasian bagi pelintas batas dari luar negeri, serta menggarap proyek pelabuhan Roro di Tanjung Medang yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Pelabuhan Roro tersebut dirancang sebagai dermaga sandar kapal feri rute domestik maupun internasional, melengkapi pelabuhan Roro di Batu Panjang yang telah lebih dahulu beroperasi.

Guna mengakselerasi daya tarik Pulau Rupat sebagai destinasi wisata unggulan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menginisiasi beragam perhelatan budaya untuk memikat wisatawan nusantara maupun mancanegara, seperti Festival Kompang, Festival Seni, hingga tradisi Mandi Safar. Pemerintah daerah turut mendorong partisipasi sektor swasta dalam membangun fasilitas penginapan berupa wisma-wisma di sepanjang garis pantai berpasir putih, mulai dari kawasan Teluk Rhu, Tanjung Punak, hingga Sungai Cingam, guna menampung wisatawan saat acara besar berlangsung. Berdasarkan keterangan berbagai narasumber di lapangan, akar persoalan dari lambatnya realisasi berbagai proyek tersebut—meski koordinasi lintas instansi telah dilakukan—terletak pada lemahnya komitmen politik dari pemerintah pusat dan provinsi dalam menyinergikan alokasi

pendanaan. Sulitnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperoleh akses pembagian program (sharing program) dan dukungan dana bersama (sharing budget) dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi faktor penghambat utama tersendatnya pembangunan di Pulau Rupat.

D. KESIMPULAN

Pembangunan Pulau Rupat sebagai pulau terluar masih berjalan lambat akibat kurangnya kerja sama program dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Berbagai pembangunan telah direncanakan, seperti kawasan wisata, pelabuhan, jalan, serta fasilitas pendukung pariwisata, tetapi belum terealisasi secara maksimal.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat belum memberikan prioritas khusus kepada Suku Akit yang masih mengalami kemiskinan dan ketertinggalan. Program pemerintah dan LSM meliputi bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyuluhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kerja sama pemerintah agar kesejahteraan masyarakat Pulau Rupat, khususnya Suku Akit, dapat meningkat.

Daftar Pustaka

Chaidar Alwasilah, 2002, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Jakarta : Pustaka Jaya, 2002.

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, (Bandung; Refika Aditama, 2010.

Friedman,F., Empowerment: The Politic of Alternative Development. Cambridge: Blackwell, 1998.

Garna, Judistira, K. Masyarakat Baduy dan Siliwangi, (Depsos RI – Gramedia. Jakarta, 1999.

Ghofur, Abdul & Hasbulah, Transformasi sosio-kultural masyarakat Suku Asli (akit) di Desa Penyengat Kecamtan Sungai Apit Kabupaten Siak, Laporan Penelitian : LPPM UIN Suska Riau, 2007.